



# Jurnal Social Library

Available online <https://penelitimuda.com/index.php/SL/index>

## Evaluasi Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana Di Provinsi Sumatera Utara

### *Evaluation of the Leadership Role of Indonesian Red Cross Officers in Disaster Emergency Response in North Sumatra Province*

Farid Hidayat Siregar<sup>(1\*)</sup>, Mapeaty Nyorong<sup>(2)</sup> & Nuraini<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup>Universitas Haji Sumatera Utara, Indonesia

<sup>(2 & 3)</sup>Institut Kesehatan Halvetia, Indonesia

\*Corresponding author: [farid@gmail.com](mailto:farid@gmail.com)

#### Abstrak

Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, yang meliputi pencegahan, penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik sebelum maupun sesudah bencana terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepemimpinan terhadap kinerja petugas Palang Merah Indonesia di Provinsi Sumatera Utara dalam tanggap darurat bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study yang dilaksanakan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Sumatera Utara, yang berlangsung dari bulan Maret sampai April 2021. Populasi penelitian ini terdiri dari 36 pengurus PMI di Sumatera Utara. Propinsi. Data survei dianalisis menggunakan uji Chi Square dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh peran katalisator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara ( $p = 0,010$ ), ada pengaruh peran fasilitator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan pada kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara dengan nilai ( $p$ ). = 0,042), ada pengaruh peran penghubung sumber dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI tanggap darurat bencana di Sumatera Utara ( $p = 0,010$ )

**Kata Kunci:** Peran; Kepemimpinan; Kinerja.

#### Abstract

Disaster management is all efforts and activities carried out, which include prevention, taming (mitigation), rescue, rehabilitation, and reconstruction, both before and after a disaster occurs. This study aims to analyze the factors that influence the role of leadership on the performance of Indonesian Red Cross officers in North Sumatra Province in disaster emergency response. This research is a quantitative research with a cross sectional study design which was carried out at the Indonesian Red Cross (PMI) office in North Sumatra, which took place from March to April 2021. The population of this study consisted of 36 PMI administrators in North Sumatra. Province. Survey data were analyzed using Chi Square test and logistic regression. The results showed that there was an influence of the role of a catalyst in the implementation of preparedness on the performance of PMI officers in disaster emergency response in North Sumatra ( $p = 0.010$ ), there was an influence of the role of a facilitator in the implementation of preparedness on the performance of PMI officers in disaster emergency response in North Sumatra with a value of ( $p$ ) = 0.042), there is an influence of the role of source liaison in the implementation of preparedness on the performance of PMI officers for disaster emergency response in North Sumatra ( $p = 0.010$ ),

**Keywords:** Role; Leadership; Performance.

**How to Cite:** Siregar, Farid Hidayat., Nyorong, Mapeaty. & Nuraini, Nuraini. 2022. Evaluasi Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana Di Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Social Library*, 2 (3): 111-117.

## PENDAHULUAN

Bencana alam atau *natural disaster* merupakan suatu peristiwa alam yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dan mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Adapun jenis bencana alam yang sering terjadi seperti; tanah longsor, gempa bumi, puting beliung, tsunami, banjir, letusan gunung merapi, kekeringan serta gelombang pasang adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Sementara itu aksi teror, konflik, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, dan kebakaran hutan merupakan bencana akibat kelalaian manusia. Bencana yang disebabkan oleh alam dan kelalaian manusia sama-sama menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan perekonomian bahkan timbulnya korban jiwa.

Berdasarkan data Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) tahun 2017, menunjukkan bahwa kematian akibat bencana di Kawasan Asia-pasifik naik lebih dari tiga kali lipat dalam dekade terakhir, dimana sebagian besar akibat bencana yang ekstrim. Adapun bencana alam yang terjadi antara Tahun 2004 dan 2016 yang dilaporkan 41,2% atau 1.690 kejadian terjadi di kawasan Asia-Pasifik. Di antara sub wilayah Asia-Pasifik, Asia Tenggara terutama Indonesia dan Filipina yang paling terpuak oleh bencana alam yang menewaskan lebih dari 350.000 yang diakibatkan dari 500 lebih insiden (BNBP, 2017).

Dampak kejadian bencana menyentuh seluruh bidang, baik ekonomi, sosial-budaya, politik, namun yang paling utama dirasakan adalah bidang kesehatan. Disadari bahwa dengan adanya kejadian bencana, maka selalu timbul wabah

penyakit yang merupakan dampak dari kondisi lingkungan yang rusak, sanitasi yang jelek, daya tahan tubuh manusia menurun drastis dan kurangnya sarana obat-obatan. Pelayanan kesehatan pada saat bencana merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kematian, kecacatan dan kejadian penyakit, karena bencana merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan biasanya terjadi secara mendadak serta disertai jatuhnya korban. Keadaan ini bila tidak ditangani secara cepat dan tepat dapat menghambat, mengganggu, serta menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat.

Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, yakni meliputi pencegahan, penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadi bencana dan menghindarkan dari bencana yang terjadi (DEPKES, 1984). Pembatasan definisi penanggulangan bencana oleh peneliti adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan guna mengurangi hingga menghilangkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan menitik beratkan pada tahapan penanggulangan bencana bagian tanggap darurat atau response pada masyarakat daerah terdampak karena pada tahapan ini merupakan indikator berhasil atau gagalnya mitigasi ataupun tahapan kewaspadaan yang telah dilakukan, selain itu tahap tanggap darurat merupakan proses dimana kejadian bencana dirasakan paling nyata dan dramatis. Dan juga menilai proses penanggulangan bencana dengan melihat prinsip penanggulangan bencana sesuai dalam Undang-Undang no 24 tahun 2007

yang meliputi: a) Cepat dan Tepat; b) Prioritas Penyelamatan Jiwa; c) Koordinasi dan Keterpaduan; dan d) Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI pusat memiliki tim persiapan tim bencana. Yaitu tim penilai masalah kesehatan masalah dini dan tim reaksi cepat yang tergabung dalam Satgana. Salah satu spesialisasinya Satgana adalah untuk menemukan masalah kesehatan saat terjadinya bencana (Tofan, 2013).

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna (Barri, 2009). Menurut Caeter kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personil.

Kesiapsiagaan merupakan kegiatan yang menunjukkan respons terhadap bencana. Faktor yang berperan dalam kesiapsiagaan bencana adalah PMI. Kesiapsiagaan adalah bagian yang integral dari pembangunan berkelanjutan. Jika pembangunan dilaksanakan dengan baik, upaya kesiapsiagaan terhadap bencana akan lebih ringan tugasnya (Arifianti, 2011).

Hal ini sangat sejalan dengan tugas pokok PMI adalah membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan

yang meliputi: Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah. Kinerja PMI dibidang kemanusiaan dan kerelawanan mulai dari tahun 1945 sampai dengan saat ini antara lain sebagai berikut: Membantu saat terjadi peperangan/konflik. Tugas kemanusiaan yang dilakukan PMI pada masa perang kemerdekaan RI, saat pemberontakan RMS, peristiwa Aru, saat gerakan koreksi daerah melalui PRRI di Sumbar, saat Trikora di Irian Jaya, Timor Timur dengan operasi kemanusiaan di Dilli, pengungsi di Pulau Galang. Semua dilakukan jajaran PMI demi rasa kemanusiaan dan semangat kesukarelawan yang tulus membantu para korban dengan berbagai kegiatan mulai dari pertolongan dan evakuasi, pencarian, pelayanan kesehatan dan tim medis, penyediaan dapur umum, rumah sakit lapangan, pemberian paket sembako, pakaian pantas pakai dan sebagainya.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 'Evaluasi Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana di Provinsi Sumatera Utara"

## **METODE**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei analitik dengan rancangan *cross sectional study* yang bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Peran kepemimpinan terhadap kinerja petugas Palang Merah Indonesia dalam tanggap darurat bencana di provinsi Sumatera Utara dengan model

pendekatan kuantitatif (Notoatmodjo, 2017).

Penelitian ini dilakukan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei Tahun 2021. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pengurus PMI Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 36 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus PMI Sumatera Utara berjumlah 36 orang. Adapun perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Total Populasi (Matondang, 2009)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis multivariat menyeleksi variabel yang  $p$  value < 0,25 pada uji bivariat (*chi-square*) dimasukkan secara bersamaan dalam uji multivariat yang bertujuan untuk mengetahui variabel peran kepemimpinan mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.11 Seleksi Variabel yang Menjadi Kandidat Model dalam Uji Regresi Logistik Berdasarkan Analisis Bivariat

Variabel	$p$ value	Seleksi
Peran kepemimpinan sebagai katalisator	0,010	Kandidat
Peran kepemimpinan sebagai fasilitator	0,042	Kandidat
Peran kepemimpinan sebagai penghubung sumber	0,010	Kandidat
Peran kepemimpinan sebagai komunikator	0,001	Kandidat

Berdasarkan 4.11 diatas dapat diketahui bahwa semua variabel yakni 4 (empat) variabel menjadi kandidat model dalam uji regresi logistik dimana  $p$  value < 0,25. Hasil analisis regresi logistik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Logistik

Variabel	B	$p$ value	Exp(B)OR	95%CI for Exp(B)
Peran kepemimpinan sebagai katalisator	1,613	0,064	5,016	0,912-27,579
Peran kepemimpinan sebagai fasilitator	0,815	0,318	2,259	0,456-11,189
Peran kepemimpinan sebagai penghubung sumber	2,109	0,025	8,236	1,311-51,751
Peran kepemimpinan sebagai komunikator	2,952	0,002	19,142	2,925-125,280

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 32 (62,7%) responden menyatakan bahwa peran kepemimpinan sebagai komunikator tidak dilakukan. Seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasannya kepada orang lainnya secara berlanjut. Bentuk komunikasi yang harus dilakukan secara dua arah supaya gagasan yang disampaikan dapat dibahas secara luas, yang mencakup para pelaksana dan khalayak sasaran perlu menguasai teknik berkomunikasi secara efektif.

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa dari 36 responden yang diteliti, sebagian besar peran kepemimpinan sebagai komunikator tidak dilakukan sebanyak 24 (66,7%) responden. Dari 24 (66,7%) responden tersebut, ada sebanyak 17 (47,2%) responden peran kepemimpinan sebagai komunikator tidak dilakukan dan kinerja tidak baik, sebanyak 7 (19,5%) peran kepemimpinan sebagai komunikator tidak dilakukan dan kinerja baik.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa hasil uji statistik diperoleh nilai  $p$  signficancy yaitu  $0,001 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa

ada pengaruh peran kepemimpinan sebagai komunikator dalam pengorganisasian kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan mampu menyampaikan materi tanggap darurat bencana dengan baik. Melalui sosialisasi manajemen bencana yang dilakukan pada semua anggota. Program pelatihan mitigasi di daerah rawan bencana banjir, pada anak dinilai mampu meningkatkan pemahaman subjek penelitian. Program pelatihan tersebut menggunakan teknik edukasi dan praktek mitigasi bencana. Program mitigasi bencana dan penerapannya meningkatkan pengetahuan dan tindakan anggota. Subjek juga mempunyai kesiapan menghadapi bencana sehingga anak usia dini dapat melakukan tindakan untuk menolong dirinya.

Pemimpin mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasannya kepada orang lainnya secara berlanjut. Pemimpin merasa penting untuk menjadi perhatian adalah merubah mind set anggotanya terhadap ketergantungan pada pemerintah, namun memandirikan masyarakat mampu untuk mengatasi masalahnya dengan CBDM (*Community Based Disaster Management*). *Community Based Disaster Management* membantu mengorganisir dirinya untuk mandiri menghadapi bencana baik dari pra, saat terjadi, dan pasca bencana. Pentingnya perubahan paradigma penanggulangan bencana yang bergeser dari tanggap darurat kepada pendekatan mitigasi dan preparedness adalah hal utama. *Community Based Disaster* dapat membantu meminimalisir korban bencana, kerugian yang diakibatkan bencana, maupun ketergantungan

terhadap bantuan. Pentingnya penciptaan *community based* disaster tentunya perlu didukung dengan penciptaan ruang yang dapat memfasilitasi pekerja sosial sebagai salah satu pihak yang bergerak di setting primer dan sekunder manajemen bencana yang berbasis komunitas.

Hal tersebut dapat berupa dalam pendampingan dan perancangan *community based* disaster bersama masyarakat maupun menghubungkan masyarakat sebagai basis dengan stakeholders. Melalui kegiatan formal maupun informal dalam bentuk sosialisasi maupun edukasi dan simulasi.

Pimpinan berkomunikasi secara efektif dan mampu mengelola informasi tentang tanggap darurat bencana dengan baik. Komunikasi efektif merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja, performance sebuah proses sistematis untuk merubah perilaku seseorang (kelompok). Pelatihan sebagai proses jangka pendek yang menggunakan cara secara sistematis, terorganisir. Peserta pelatihan akan memperoleh ketrampilan praktis untuk tujuan tertentu. Pelatihan siaga bencana dalam hal ini upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan peserta terhadap fenomena gempa bumi, tindakan mitigasi dan tanggap darurat. Peserta memiliki kemampuan realistik dalam menghadapi bencana yang mengancam tanpa di duga kapan akan terjadi. Budaya keselamatan dan ketahanan khususnya, perlu dikembangkan melalui program pelatihan siaga. Pengalaman yang dirasakan masyarakat di Indonesia, pernah terjadi bencana besar seperti tsunami di Aceh, yang menghilangkan jutaan korban jiwa dan harta benda.

Pelatihan kesiapan menghadapi bencana sangat diperlukan, mencakup tentang cara yang tepat untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi dan juga menghindari kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pimpinan memang harus mendengarkan keluh kesah anggota dalam kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dengan baik serta pimpinan mampu mengelola informasi dari pihak internal dan eksternal dalam kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dengan baik dan pimpinan mampu menyampaikan informasi tentang fungsi peran masing-masing anggota dengan baik. Oleh karenanya, upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu di sesuaikan dengan kondisi daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ristrini, dkk (2012) dengan judul penelitian "Analisis Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Di Provinsi Sumatera Barat" Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek legal Kebijakan Kesiapsiagaan bencana Bidang Kesehatan di Propinsi Sumatera Barat, telah didukung oleh Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007, tentang Penanggulangan bencana dan SK Kepala Dinas Kesehatan No.360.108/PP Bencana/VI/2011 tentang Tim Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. Jejaring kelembagaan, peran serta fungsi lembaga penanggulangan bencana bidang kesehatan telah terbentuk dan diatur oleh SK Kepala Dinas

Kesehatan/Institusi/Lembaga maupun prosedur tetap sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pembiayaan bersumber APBD, APBN dan bantuan luar negeri. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan berbagai program kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai sektor yaitu BPBD, RSUD dr. M. Djamil Padang, PMI, TNI, Polda dan organisasi profesi (Ristrini dkk,2012).

Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah. Dengan adanya pimpinan yang komunikatif maka diharapkan dapat dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 Pasal 20 dinyatakan bahwa badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi: 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Evaluasi Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana di Provinsi Sumatera Utara”, maka dapat disimpulkan bahwa: Variabel peran kepemimpinan sebagai komunikator merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di provinsi Sumatera Utara dengan nilai p signficancy yaitu  $0,001 < 0,05$

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifianti, Yukni. Buku mengenal tanah longsor Sebagai media pembelajaran bencana sejak dini. *Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi*, 2011, 6.3: 17-24.
- Barri, Adhitya. 2009. Muhammadiyah dan Kesiapsiagaan Bencana. Bandung. Risalah MDMC
- BNBP. Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 2017.
- Departemen Sosial, R. I. Pola dasar pembangunan bidang kesejahteraan sosial. 1984
- Matondang, Zulkifli. Validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. *Jurnal Tabularasa*; 2009, 6.1: 87-97.
- Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2017.
- Ristrini, dkk (2012) dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Di Provinsi Sumatera Barat”
- Sofiansah, Tofan. Sistem informasi donor darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung berbasis web. 2013
- Wille, Klaas, et al. Validation and application of an LC-MS/MS method for the simultaneous quantification of 13 pharmaceuticals in seawater. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 2010, 397.5: 1797-1808.